

# **KONFLIK POSO**

## **(KAJIAN HISTORIS TAHUN 1998-2001)**

**Igneus Alganih**

*Universitas Pendidikan Indonesia*

*E-mail : igneusalganih@gmail.com*

**Abstrak:** Penelitian ini berangkat dari permasalahan utama yang menjadi keresahan peneliti, yaitu mengapa terjadi konflik berkepanjangan antara penduduk agama Islam dengan Kristen di Poso? Permasalahan tersebut dikembangkan menjadi empat pertanyaan rumusan masalah yaitu (1) Apa yang menjadi penyebab akar masalah terjadinya konflik di Poso? (2) Bagaimana dinamika terjadinya konflik di Poso tahun 1998-2001? (3) Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik di Poso? (4) Bagaimana dampak konflik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Poso? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Konflik Poso terjadi bersamaan dengan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1998 yang menyebabkan terjadinya perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan. Konflik Poso ini berdampak sangat merugikan ditatanan bidang, politik, ekonomi dan sosial budaya serta meninggalkan beban trauma psikologis terutama pada anak-anak dan perempuan yang mengalami trauma kekerasan atau pelecehan ketika kerusuhan terjadi. Konflik yang terjadi di Poso mengingatkan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sesungguhnya masih suatu cita-cita yang harus diperjuangkan untuk menjaga persatuan nasional.

**Kata kunci:** *Konflik, Desentralisasi, Kekuasaan.*

## PENDAHULUAN

Konflik pertikaian berlatar belakang Suku bangsa, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) serta menjurus ke arah disintegrasi bangsa banyak sek/ali terjadi setelah pada tahun 1998 yaitu, ketika Indonesia memasuki era Reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto melalui gerakan mahasiswa. Jatuhnya pemerintahan Soeharto ini membuat rakyat Indonesia mengalami *euforia* kebebasan dalam berpolitik, pola pemerintahan yang lebih demokratis dan perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan (otonomi daerah).

Poso merupakan suatu wilayah Kabupaten dari Provinsi Sulawesi Tengah, nama Poso ini pun menjadi sekaligus ibu kota kabupaten ini. Kabupaten Poso secara administratif terbagi menjadi 19 kecamatan, yang terdiri dari 23 kelurahan dan 133 desa, dengan total jumlah penduduk 209.228 jiwa (BPS Sulawesi Tengah 2011: 94, 96). Data Sulawesi Tengah dalam angka tahun 2006 yang dikutip Hendrajaya *et al.* (2010: 19), untuk penganut agama di Poso relatif seimbang dalam hal penganut agama dengan 45% penduduk beragama Islam, 35 persen beragama Kristen, sedangkan sisanya penganut Buddha, Hindu dan lainnya. Umumnya agama Islam dipeluk warga pendatang dari Jawa, Lombok, Gorontalo, Sulawesi Selatan (Bugis dan Makassar), serta penduduk asli Tojo, Bungku dan Togian. Sedangkan Penduduk beragama Kristen berjumlah umumnya penduduk asli dari suku Pamona, Mori, serta pendatang dari Manado, Toraja dan Nusa Tenggara Timur (Karnavian, 2008: 5).

Konflik yang dikhawatirkan benar-benar terjadi di Poso pada tahun 1998. Poso yang awalnya damai dan dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kemudian berubah menjadi tempat pertikaian dan terjadinya konflik

sosial berdarah melibatkan unsur etnis dan agama di dalamnya. Konflik di Poso yang melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen ini, mengakibatkan kerusuhan massal hingga jatuhnya banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada tahun 1998-2001. Konflik ini pun telah membuat para perempuan, laki-laki dewasa, orang tua, remaja, anak-anak, lanjut usia, segala usia dari segala lapisan dan latar belakang, tanpa terkecuali, terseret, dipaksa masuk dalam tepian dan pusaran konflik kekerasan berdarah yang berkepanjangan (Gogali, 2009: 21).

Permasalahan yang dikembangkan dalam tulisan ini yaitu: apa yang menjadi penyebab akar masalah terjadinya konflik di Poso; Bagaimana dinamika terjadinya konflik di Poso tahun 1998-2001? Dan Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik di Poso?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode historis dengan langkah-langkah penelitian sebagaimana yang dijelaskan Abduhrahman (2007, 54-80) adalah sebagai berikut: teknik pemilihan topik dan penyusunan rencana penelitian; heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

## PEMBAHASAN

### 1. Latar Belakang Konflik

Salah satu penyebab konflik Poso adalah permasalahan yang berkaitan dengan problema historis yang menyangkut masalah penduduk asli Poso yang merasa termarginalkan dengan keberadaan penduduk pendatang dari luar Poso. Kondisi ini dapat dianalisis berdasarkan pengertian konflik sosial menurut Coser dalam Oberschall (1978: 291), '*social conflict is a struggle*

*over values or claims to status, power, and scarce resources, in which the aims of the conflict groups are not only to gain the desired values, but also to neutralise, injure, or eliminate rivals*'. Merujuk pada pengertian konflik sosial menurut Coser ini yang menyatakan bahwa penyebab latar belakang dari konflik biasanya karena pertentangan atau pertikaian antar kelompok dengan identitas yang jelas terlibat konflik dalam mengejar atau memperebutkan isu-isu tertentu, seperti pertentangan nilai atau menyangkut klaim terhadap status (jabatan politik/sosial), kekuasaan, pertentangan dan sumber daya alam.

Kehadiran penduduk pendatang ini telah membuat perubahan transformasi sosial-ekonomi di Poso yang diawali dengan peralihan lahan dari penduduk asli ke pendatang. Para pendatang kemudian sukses dan berhasil setelah mendapat keuntungan dari hasil tanaman pertanian dan perkebunan yang ditanamnya, terutama hasil tanaman coklat yang memberikan keuntungan besar pada tahun 1990an. Keberhasilan pendatang ini membuat kesenjangan sosial terjadi di Poso dan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial bagi penduduk asli yang merasa termarginalkan dan tersingkirkan ditanah kelahirannya sendiri.

Setelah termarginalisasi dibidang sosial ekonomi terjadi pula marginalisasi dibidang politik yang membuat penduduk asli benar-benar merasa tersingkirkan. Hal ini terjadi karena pada masa lalu sebenarnya elit Kristen kekuasannya dominan di pemerintahan Kabupaten Poso akan tetapi kondisi berbalik setelah Islam lebih banyak penganutnya di Poso. Karena dengan meningkatnya penganut agama Islam membawa keuntungan tersendiri bagi elit politik Islam untuk memperoleh kursi kekuasaan yang lebih banyak dipemerintahan jika menyangkut perolehan suara dalam Pemilu melalui sentimen agama. Kemudian dengan adanya keberadaan ICMI yang mengembangkan

elemen ikatan berbasis patron dan klien berdasarkan identitas agama Islam semakin membuat elit kelompok Kristen semakin termarginalkan dan tersingkirkan dari pusaran kekuasaan politik di pemerintahan Kabupaten Poso.

Selanjutnya jika dilihat dari aspek antropologis dengan beragamnya komunitas etnis dan agama di Poso, dapat menjadi salah satu faktor untuk dicermati karena dengan keberagaman kondisi perbedaan adat istiadat dan karakter etnis suku yang satu sama lain berbeda ini, menjadi salah satu potensi terjadinya konflik sosial karena jadi memudahkan masyarakat yang berbeda suku etnis dan agamanya ini dapat diprovokasi untuk terlibat dalam konflik komunal. Perbedaan agama di Poso akhirnya menjadi senjata ampuh bagi para elit untuk dijadikan kendaraan politiknya untuk saling bersaing dan berkonflik mendapatkan jabatan kekuasaan dalam mencapai kepentingan politik di daerahnya. Di sini para elit politik dalam mencapai kepentingan politiknya tersebut melakukannya dengan cara memobilisasi massa melalui isu sensitif yaitu isu etnis dan agama. Sehingga ketika konflik komunal terjadi kemudian dihubungkan dengan isu sensitif etnis dan agama di Poso maka konflik cenderung terjadi berlarut-larut dan berkepanjangan.

## **2. Persaingan Elit Politik di Poso**

Pada masa sebelum diterapkannya demokrasi dan desentralisasi di Kabupaten Poso untuk pembagian kekuasaan Bupati, Sekwilda dan Ketua DPRD Poso diatur oleh pemerintah pusat, termasuk dalam distribusi kekuasaan berdasarkan agama dan selalu berimbang (Hasrullah, 2007: 89). Dalam rotasi tersebut dikenal dengan istilah *power sharing* yang dilakukan untuk menghormati keragaman agama di Kabupaten Poso. Berikut tabel jabatan bupati di Poso.

**Tabel Bupati yang menjabat di Kabupaten Poso periode 1967-2004**

Bupati	Asal Agama
Drs. Galib Lahasido (1967-1973)	Islam
Drs. R.P.M Koeswandi (1973-1984)	Kristen
Soegiono (1984-1988)	Islam
Drs. J.W. Sarapang (1988-1989)	Kristen
Arief Patanga (1989-1999)	Islam
Drs Abdul Muin Pusadan (1999-2004)	Islam

Sumber: Muin, H. A. (2008: 44)

Pada tabel tersebut terlihat jabatan Bupati di Poso selalu dirotasi berdasarkan dua agama dominan di Poso yaitu Islam dan Kristen. Rotasi *power sharing* ini dimulai pada jabatan bupati periode tahun 1967-1973 yang dipegang oleh Galib Lahasido dari kelompok Islam, kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto jabatan bupati digantikan oleh Koewandi (1973-1984) yang diangkat dari kelompok Kristen, setelah periode jabatan Bupati Koewandi habis maka diganti dari tokoh kelompok Islam yaitu Bupati Soegiono (1984-1988), kemudian pengangkatan Bupati berdasarkan rotasi agama di Poso terjadi begitu seterusnya sampai rotasi *power sharing* ini berakhir pada periode Bupati Arief Patanga tahun 1999, yaitu ketika mulai diterapkannya sistem demokrasi dan desentralisasi di Indonesia. Sistem demokrasi ini telah membawa perubahan ditatanan pemerintahan Kabupaten Poso karena pada masa demokratisasi ini komposisi penduduk berdasarkan SARA tidak lagi menjadi formula politik dalam mengatur *power sharing*, yang berlaku adalah kelompok siapa yang memiliki banyak massa dan pendukung maka kelompok itulah yang akan berkuasa

(Winarti dan Puspitasari, 2012: 95). tersingkir karena alasan demokrasi.

Ketika jabatan Bupati Arief Patanga pada tahun 1998 akan selesai pada masa jabatannya. Sejak itu persaingan jabatan bupati berlangsung sangat sengit Pada bulan Juni 1999, Gubernur Sulawesi Tengah H.B. Paliudju mengeluarkan surat pemberhentian Arief Patanga dari jabatan Bupati Poso dan mengangkat wakil Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Haryono sebagai pejabat sementara, dengan tugas utama mempersiapkan proses pemilihan Bupati Poso (Surahman, 2007: 186). Setelah itu muncullah nama-nama kandidat calon Bupati Poso yang beredar di masyarakat Poso yang masing-masing mewakili kelompok politik lokal di Poso, antara lain Abdul Malik Syahadap, Abdul Muin Pusadan, Akram Kamarudin, Mas'ud Kasim (mewakili kelompok Islam), Damsyik Ladjalani, Eddy F. Bungkundapu dan Yahya Patiro (Kelompok Kristen). Kemudian dilakukan penjurangan calon Bupati Poso, dari beberapa nama yang diajukan, tiga lolos seleksi yaitu, Abdul Muin Pusadan, Mas'ud Kasim (kelompok Islam) dan Eddy Bungkundapu (Kelompok Kristen). Pemilihan Bupati dilangsungkan pada 30 Oktober 1999 dengan menghasilkan terpilihnya Abdul Muin Pusadan sebagai Bupati Kabupaten Poso dengan memperoleh 16 suara, sementara Mas'ud Kasim memperoleh 13 suara dan Eddy Bungkundapu 10 suara (Amidhan. et al, 2007: 67).

Semenjak pemilihan dan pelantikan bupati, situasi di Poso kembali memanas ketika persoalan *power sharing* menjadi tuntutan utama dalam mekanisme pembagian kekuasaan politik berdasarkan agama di Poso. Saat Bupati terpilih yaitu Abdul Muin Pusadan yang merupakan dari kelompok Islam, maka elit Kristen menuntut untuk diangkatnya Sekwilda dari kalangan komunitas Kristen. Namun yang diangkat oleh Bupati Abdul Muin Pusadan,

Sekwildanya diangkat dari kelompok Islam. Hal ini membuat elit lokal tidak puas, khususnya dari elit politik Kristen yang kecewa karena tidak mendapat jatah kue kekuasaan (Hasrullah, 2009: 80). Kelompok Kristen menganggap bahwa birokrasi yang ada di pemerintahan Poso tidak mencerminkan aspirasi warga Kristen, banyaknya birokrasi muslim yang berkuasa dipemerintahan dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga Kristen. Sebaliknya kelompok Islam menganggap bahwa komposisi birokrasi yang ada sudah sangat aspiratif, oleh sebab itu tidak boleh dirubah-rubah (Wahid dan Ihsan, 2004: 188).

Jika aspirasi masyarakat yang terakumulasi diabaikan begitu saja oleh pemerintah daerah, yakni aspirasi yang menghendaki Drs. Damsyik Ladjalani menjadi Sekwilda Poso, kondisi kota Poso yang pernah digunjang kerusuhan bernuasa SARA (1998), bakal rusuh kembali dan akan terjadi kerusuhan yang bernuasa SARA yang lebih besar, bahkan lebih hal ini telah dikonfirmasi kepada beberapa tokoh agama dan dikonfirmasi kepada beberapa tokoh agama dan masyarakat Poso (dikutip dari Harian Mercusuar, Palu, Edisi Sabtu 15 April 2000 dalam Damanik, 2003: 23).

### 3. Jalannya Konflik

Konflik komunal di Poso pertama kali terjadi pada 24 Desember 1998, yang sebenarnya adalah karena faktor pertikaian antar pemuda yang berbeda agama. Peristiwa ini menimbulkan sentiment agama yang cukup tajam bagi agama Islam dan Kristen, karena momentum kejadian ini bertepatan dengan perayaan natal dan bulan puasa yang juga kebetulan bertepatan dengan situasi politik yang sedang memanas terhadap isu permasalahan pemilihan Bupati di Poso. Terjadinya peristiwa ini kemudian oleh oknum elit politik lokal dijadikan alat untuk menghimpun dan memobilisasi massa berdasarkan agama untuk mendukung kepentingan politiknya dalam persaingan

pemilihan jabatan bupati baru di Poso, sehingga peristiwa yang awalnya berupa perkelahian antar pemuda ini kemudian menjadi isu konflik masalah antar agama yang berbeda di Poso. Hal ini menjadi isu perekat bagi kedua belah pihak untuk saling memperkuat struktur *in group* dan *out group* dalam memobilisasi massa berdasarkan identitas agama, penduduk beragama Islam mengelompokkan dirinya dalam kelompok Islam kemudian menamai dirinya kelompok putih, sedangkan penduduk Kristen mengelompokkan dirinya ke dalam kelompok Kristen kemudian menamainya kelompok merah.

Pada konflik kedua yang berlangsung pada bulan April 2000 fenomenanya sungguh erat dengan nuansa politik karena bertepatan pemilihan jabatan Bupati Poso dan adanya isu tuntutan pembagian jatah kekuasaan antara elit kelompok Kristen dengan kelompok Islam. Ketika tuntutan *power sharing* tidak terpenuhi, lagi-lagi konflik pertikaian antar pemuda dijadikan senjata ampuh untuk memobilisasi massa berdasarkan agama, sehingga konflik kerusuhan bernuansa SARA kembali terjadi.

Pada konflik yang berlangsung pada bulan Mei 2000 sampai Desember 2001, fenomena konflik berlatar belakang politik tidak nampak lagi karena konflik telah berubah menjadi konflik non realistik, dalam arti bahwa konflik semula berupa konflik realistik yaitu konflik persaingan antar elit politik yang sedang memperebutkan jabatan kekuasaan di Poso, kini berubah menjadi konflik non realistik yaitu konflik yang jadi bernuasa SARA. Konflik yang terjadi telah mengindikasikan ke arah perang saudara yang melibatkan ideologi berdasarkan isu agama dan etnis.

Pada Konflik yang berlangsung pada Mei 2000-Desember 2001, fenomena konflik telah mengarah pada perang saudara yang membuat konflik terjadi berlarut-larut dan berkepanjangan. Hal itu dikarenakan isu

sensitif agama yang membuat masing-masing kelompok yang bertikai saling memperkuat struktur kelompoknya. Masing-masing kelompok jadi memandang bahwa konflik yang terjadi merupakan perang suci agama yang harus diperjuangkan. Penduduk beragama Islam memandang perang ini sebagai jihad begitu pula dengan penduduk beragama Kristen menganggap sebagai perang salib, hal ini tentu akan membuat konflik terjadi semakin berkepanjangan karena masing-masing agama akan memandang perang ini sebagai upaya untuk menang secara duniawi atau mati suci karena membela kebenaran agamanya.

Melalui isu agama pulalah yang membuat konflik menjadi mudah tereskalasi lebih luas melibatkan masyarakat dan wilayah lainnya diluar ibukota Kabupaten Poso, tercatat selain Kecamatan Poso kota konflik pun meluas ke wilayah lain seperti Kecamatan Poso Pesisir, Lage, Tojo dan Pamona Selatan yang menjadi ikut terlibat dalam perang saudara ini untuk turut ikut campur dengan alasan perang suci agama. Kemudian ditambah ketika isu agama ini mencuat ke skala nasional bahkan dunia internasional telah membuat suasana konflik menjadi sangat rumit dan kompleks karena turut campurnya pihak luar yang ikut memperkeruh suasana Poso dengan bantuan dana, persenjataan dan bantuan milisi untuk berperang dalam konflik, sehingga fenomena kekerasan pada konflik jilid ketiga ini berbeda dengan dua jilid konflik yang terjadi sebelumnya. Kekerasan sebelumnya terjadi secara berhadapan dengan penggunaan senjata tradisional seperti panah, pisau, parang, papporo dan senjata rakitan lainnya, namun ketika pada konflik jilid ketiga ini telah membuat kekerasan bertransformasi dari penggunaan senjata tradisional ke senjata api dan bom (Surahman, 2007: 240).

#### **4. Peranan Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik**

Salah satu upaya perdamaian yang paling berarti dan berpengaruh adalah Deklarasi Damai Malino I pada Desember 2001. Upaya damai ini bermula dari inisiatif pendeta A. Tobondo yang menghubungi Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Susilo Bambang Yudhoyono), Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat (Jusuf Kalla) dan Menteri Pertahanan (Abdul Jalil), untuk segera mengupayakan perdamaian di Poso (Purwanto, 2007: 95).

Keinginan tersebut direspon oleh pemerintah pusat melalui Menko Kesra Jusuf Kalla yang ditunjuk menjadi pemimpin mediator dalam upaya damai di Poso. Ditunjuknya Menko Kesra Yusuf Kalla sebagai pemimpin dalam perdamaian di Poso, karena selain tokoh dari Sulawesi juga mempunyai jaringan yang luas dan kuat di Sulawesi. Dalam proses penanganan konflik di Poso akhirnya diputuskan bahwa, pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi upaya perdamaian di Poso dan bukan penentu penyelesaian konflik, karena yang memegang kendali penyelesaian adalah masyarakat yang bertikai itu sendiri.

Menindak lanjuti keinginan damai, kemudian Yusuf Kalla menginisiasi pertemuan dimulai pada tanggal 18-20 hari di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 75 peserta, dengan rincian 25 peserta dari kelompok putih (Islam), 25 peserta dari kelompok merah (Kristen) dan 25 peserta sisanya sebagai mediator diantaranya adalah Menkokesra Yusuf Kalla, Gubernur Sulawesi Selatan HZB Palaguna, Gubernur Sulawesi Tengah Aminudin Ponulele, Pangdam VII/ Wirabuana yaitu Mayjen Ahmad Yahya dan Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Zainal Abidin Ishak, kemudian dari peninjau diantaranya dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Din Syamsudin, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) diwakili oleh pendeta Natan Setiabudi, J. Likuada dari

KWI, dari kantor Polkam Mayjen Bambang Sutedjo dan perwakilan dari Mabes TNI adalah Mayjen Suwisma (Wahid dan Ihsan, 2004: 203). Hasil pertemuan tersebut akhirnya dihasilkan 10 poin kesepakatan yang dituangkan dalam Deklarasi Malino I, yang isinya dikutip dari Awaludin (2009, 55-56) adalah sebagai berikut:

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakkan hokum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.
3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan darurat sipil serta campur tangan pihak asing.
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama.
6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat.
7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.
9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh.
10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya.

## **5. Peranan Tokoh Masyarakat Poso dalam Penyelesaian Konflik**

Terlibatnya sejumlah tokoh agama ataupun elit sosial dalam konflik sungguh sangat disesalkan karena bukannya membuat massa kelompoknya untuk berdamai dan menghentikan konflik, di sini justru terlibat atau melibatkan diri dalam konflik, sehingga membuat konflik menjadi semakin rumit dengan nuansa perang agama. Idealnya tokoh agama dan elit sosial ini ketika konflik terjadi di Poso hendaknya berperan untuk memberikan pemahaman dan pengarahan kepada masyarakat agar tidak terpancing ataupun terlibat dalam kerusuhan, karena sesungguhnya konflik yang terjadi bukanlah kekerasan yang bernuansa agama tetapi konflik pertikaian antar elit politik yang mempolitisasi agama dan etnis untuk mencapai kepentingannya. Jika saja peran tokoh agama ataupun elit sosial masyarakat ini berjalan dengan baik tentu konflik yang terjadi di Poso tidak akan sampai berlangsung rumit dan berkepanjangan, sebagai contoh berfungsinya peran tokoh agama dan elit sosial menjalankan fungsinya menjadi sokoguru dalam menjaga perdamaian dan kerukunan masyarakat adalah di Desa Tangkura wilayah Kecamatan Poso Pesisir. Di Desa Tangkura terdapat fenomena unik yang patut dicontoh dan diterapkan dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik, karena ketika situasi konflik Poso sedang memanas dan kekerasan menyebar sangat cepat serta mengancam situasi setiap orang karena identitas agama, di Desa Tangkura melalui peran tokoh agama dan elit sosial isu agama berhasil dikelola dengan baik, sehingga masyarakat tidak mudah

terprovokasi dan menjadikan tidak seorompok penduduk desa yang meninggal dalam kerusuhan atau terlibat untuk saling membunuh atas nama agama, sebaliknya penduduk Tangkura yang berbeda agama ini saling melindungi satu sama lain (Pamuji, et al, 2008: 35).

Selain di Desa Tangkura, inisiatif bersifat mikro yang berusaha mencegah melebarnya konflik terjadi pula antara Kepala Desa dan tokoh agama Tokorondo yang muslim dengan Kepala Desa Masani yang Kristen, kesepakatan yang diperoleh dari kedua desa tersebut adalah jika terjadi penyerangan oleh kelompok tertentu yang datang dari manapun, maka kedua kelompok sepakat untuk bekerja sama dan mempertahankan wilayah (Mashad dan Yustiningrum, 2006: 62).

Berdasarkan dua contoh upaya perdamaian atas inisiatif dari elit sosial masyarakat yang berhasil dalam pengelolaan konflik di daerahnya, maka dapat dijadikan rujukan bahwa peran elit sosial seperti tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemimpin masyarakat setempat sangatlah penting untuk dilibatkan dalam menjalin perdamaian dan penyelesaian konflik.

## **PENUTUP**

Konflik Poso sebenarnya adalah konflik realistik yaitu, perebutan kekuasaan politik antar elit politik lokal di Poso yang kemudian massa dilibatkan dengan identitas agama dan etnis dengan tujuan untuk memobilisasi massa dalam memperoleh kekuasaan. Ketika konflik menyentuh ranah agama membuat pertikaian menjadi konflik non realistik bernuansa SARA dan menjadikan konflik terjadi berkepanjangan.

Mudahnya massa termobilisasi dalam konflik komunal di Poso, dipengaruhi juga oleh permasalahan historis yang dimanfaatkan oleh elit politik lokal melalui isu berupa kecemburuan sosial-ekonomi dan sosial-politik antara penduduk pribumi yaitu etnis Pamona, Mori dan Lore (mayoritas beragama Kristen) yang merasa termarjinalkan terhadap kehadiran dari etnis Jawa, Bugis dan Makkasar (mayoritas beragama Islam).

Upaya perdamaian yang sangat berpengaruh hasilnya dalam menghentikan konflik Poso adalah setelah turun tangannya pemerintah pusat melalui Menko Kesra Jusuf Kalla yang ditunjuk menjadi pemimpin mediator dalam upaya damai di Poso.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- Amidhan, et al. (2005). *Poso, Kekerasaan yang Tak Kunjung Usai: Refleksi 7 Tahun Konflik Poso*. Jakarta: Komnas HAM.
- Aragon, L.V. (2007). "Persaingan Elit di Sulawesi Tengah", dalam *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Awaludin, H. (2009). *Perdamaian Ala JK: Poso Tenang, Ambon Damai*. Jakarta: Grasindo.
- Damanik, R. (2003). *Tragedi Kemanusiaan Poso, Menggapai Surya Pagi Melalui Kegegelapan*. Poso: PBHI LPSHAM.
- Gogali, L. (2009). *Konflik Poso Suara Perempuan dan Anak Menuju Rekonsiliasi Ingatan*. Yogyakarta: Galangpress.
- Hasrullah. (2009). *Dendam Konflik Poso*. Jakarta: Gramedia.



Karnavian, M.T. (2008). *Indonesian Top Secret Membongkar Konflik Poso*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Klinken, G.v. (2007). *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Muin, H. A. (2008). *Sumber-sumber Konflik di Poso dan Penanganannya Dalam Konflik Komunal: Studi Kasus Poso 1998-2007*. Tesis Magister pada Program Magister Studi Pembangunan Alur Studi Pertahanan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Intitut Teknologi Bandung: tidak diterbitkan.

Poloma, M. M. (1994). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers.

Purwanto, W. (2007). *Menggapai Damai di Poso*. Jakarta: CBM Press.

Susan, N. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahid, A.Y. dan Ihsan, B. (2004). *SBY dan Resolusi Konflik: Langkah-langkah penyelesaian Konflik di Aceh, Atambua, Papua, Poso dan Sampit*. Jakarta: Relawan Bangsa.

Winarti, M. dan Puspitasari, R. (2012). "Pelajaran dari Kasus Konflik di Poso Sulawesi Tengah", dalam *Prosiding International Seminar Social Movement Historical Perpective*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.